

## **ABSTRAK**

**AHMAD MARDIN,2017. Peranan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam pelayanan Masyarakat Kota Makassar,fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah Makassar. Di bimbing Nurlina Subair dan Muhajir.**

Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana peranan satuan polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman serta pelayanan masyarakat di Kota Makassar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam penjagaan ketertiban dan ketentraman di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan dasar penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder, kemudian hasil dari data tersebut dianalisa secara kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranana koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelayanan masyarakat tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Makassar . Yang menjadi objek penegakan Perda di Kota Makassar Peraturan Daerah No 9 tahun 2002 adalah pelayanan terhadap masyarakat .Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pelayanan terhadap masyarakat serta ketentraman dan keteriban di Kota Makassar dalam hal ini penegakan Peraturan Daerah No 9 tahun 2002 adalah tingkat pendidikan, Fasilitas dan peralatan yang berhubungan dengan alat yang nantinya akan menunjang pelaksanaan tugasnya dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kota Makassar , dan Peran Pemerintahan sebagai pembuat regulasi dan juga pengambil kebijakan yang akan menunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Makassar

**Kata kunci: Peranan Koordinasi dalam Pelayanan Masyarakat**